



**P E M E R I N T A H
K A B U P A T E N M O J O K E R T O**

**RANCANGAN
AKHIR RENCANA
KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir RENJA ini dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat memberikan arah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi lembaga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Akhirnya saran dari para pengguna Rancangan Akhir RENJA ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan Rancangan Akhir RENJA di tahun-tahun mendatang

Mojokerto, Juni 2022

Kepala DP2KBP2



dr. SUJATMIKO, M.M., M.M.R

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 199603 1 002

DAFTAR ISI

Pengantar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i
Daftar Isi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ii
Daftar Tabel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	iii
BAB I	PENDAHULUAN										
	1.1	Latar Belakang.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	1.2	Landasan Hukum	.	.	.	.	.	.	.	.	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	.	.	.	.	.	.	.	.	5
	1.4	Sistematika Penulisan.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021										
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021	.	.	.	.	.	.	.	.	10
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2021	.	.	.	.	.	.	.	.	31
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	.	.	.	.	.	.	.	.	41
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.	.	.	.	.	.	.	.	44
	2.5	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan.	.	.	.	.	.	.	.	.	54
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN										
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.	.	.	.	.	.	.	.	56
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023.	.	.	.	.	.	.	.	.	57
	3.3	Program dan Kegiatan	.	.	.	.	.	.	.	.	58
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.										
			.	.	.	.	.	.	.	.	88
BAB V	PENUTUP										
			.	.	.	.	.	.	.	.	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah – hal 11
Tabel	: Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran – hal 38
Tabel 2.2	: Pencapaian kinerja Pelayanan DP2KBP2 – hal. 40
Tabel 2.3	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2020 – hal 45
Tabel 2.4	: usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun Anggaran 2020 – hal 54
Tabel TC-33	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2021 - hal 62
Tabel 4.1	: Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggran 2023 p- hal 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Ranwal Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Program Pemberdayaan Perempuan dengan upaya-upaya peningkatan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dan anak melalui penguatan kelembagaan gender dan anak, meningkatkan kampanye anti trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan dan

perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan , eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Sementara Program Keluarga Berencana merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia kawin, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga merupakan strategi dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dengan berorientasi pada kesehatan reproduksi dan penghormatan hak-hak reproduksi seseorang sebagai bagian integral pembangunan nasional.

Untuk itu baik Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaan pada tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Didalamnya memuat kegiatan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi PPRG dan fokus pengawasan urusan pemerintahan Bidang PP dan PA.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan APBD 2020. Didalamnya mencantumkan kewajiban bagi OPD untuk menyusun analisis gender dan menuangkan dalam GBS serta dilampirkan dalam RKA.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kondefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutanaan Gender
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

- (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
 25. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021;
 26. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dimaksudkan agar :

- a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas untuk menentukan kegiatan strategis di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun satu tahun.
- b. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder), monitoring, analisis data, evaluasi/pemantapan program baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi ke semua pihak yang berkepentingan untuk memiliki pandangan yang sama secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam upaya mencapai prioritas peningkatan kualitas SDM.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Akhir Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 adalah untuk :

- a. Menjabarkan arahan Renstra Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 kedalam operasionalisasi program
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif
- c. Menyediakan dokumen rencana kerja perangkat daerah sebagai acuan operasional program
- d. Menentukan strategi untuk peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber dana organisasi

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian dengan ringkas, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturandaerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja tahun 2023, rencana dan hubungannya dengan dokumen Renstra dan RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

1.4. Sistemmatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun dari hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2023.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto per tanggal 30 Desember 2021 sebesar **78,59 %** sebagai berikut :

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 19.340.578.790,00
Refokusing PAPBD	<u>Rp. (1.204.304.562,00)</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 18.136.274.288,00
Realisasi	<u>Rp. 14.252.444.199,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 3.883.830.029,00</u>

Sedangkan anggaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2021 adalah sebesar Rp 19.340.578.790,00.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Mojokerto

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28 %	83,28 %	83,28 (A)	83,19 (A)	83,19 (A)	83,78 (A)	-	-
				Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	90 %
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100 %	5 Dok	15 Dok	300 %
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	5 Dokumen	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100 %	5 Dok	15 Dok	300 %
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	86 %	85 %	85 %	85 %	100 %	85 %	255 %	264 %
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100 %	14 bulan	42 bulan	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	65,57 %	-	-	-	-	-	-	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai DP2KBP2 yang mendapatkan pakaian dinas	53 Orang	-	-	-	-	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan : Kursi kerja pejabat dan meja rapat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100 %	18 Unit	54 Unit	300 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Mamin yang Di Sediakan	240 Kotak	356 ktk	356 ktk	356 ktk	100 %	356 ktk	1.308 kotak	545 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	130.802 lbr	130.802 lbr	130.802 lbr	130.802 lbr	100 %	130.802 lbr	292.406 lbr	300 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	300 %
	Penyediaan Bahan / Material	Jenis ATK yang di Sediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	12 Paket	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	175 kotak	100 kotak	100 kotak	100 kotak	100 %	175 kotak	375 kotak	214 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172 kali	172 kali	172 kali	172 kali	100 %	172 kali	516 kali	300 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	300 %
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Orang	5 orang	5 orang	5 orang	100 %	5 orang	15 orang	300 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	809 Unit	809 unit	809 unit	809 unit	100 %	809 unit	2.427 unit	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	100 %	4 Gedung	12 Gedung	300 %
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100 %	21 Unit	63 Unit	300 %
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	82,14%	78,57 %	78,57 %	78,57 %	100 %	80,36 %	241 %	60 %
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	86 OPD	54 OPD	54 OPD	54 OPD	100 %	86 OPD	194 OPD	359 %
		Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	58 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	100 %	58 OPD	116 OPD	200 %
		Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	28 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	100 %	28 OPD	86 OPD	307 %
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial	40 Orang	40 Org	40 Org	40 Org	100 %	40 Orang	120 Org	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan yang Dilatih Berwirausaha								
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah PEKKA dan perempuan korban kekerasan yang dilatih berwirausaha	40 Orang	40 Org	40 Org	40 Org	100 %	40 Orang	120 Org	300 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 Orang	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	100 %	90 Orang	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan perempuan pengambil keputusan yang mendapatkan pembinaan di bidang politik	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	-	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kepala desa yang mendapat pembinaan terkait komitmen pemerintah desa dalam penanganan perempuan dan anak	54 Orang	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	100 %	40 Orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Program Perlindungan Perempuan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3 %
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65 Orang	14 Mitra kerja/Jejaring	14 Mitra kerja/Jejaring	14 Mitra kerja/Jejaring	100 %	65 Orang	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (APBD dan DAK NON FISIK BIDANG PP)	- Jumlah lintas sektor yang bersinergi dengan P2TP2A (APBD) - Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO (DAK NON FISIK BIDANG PP)	60 Orang 65 Orang	40 Org 65 Org	40 Org 65 Org	100 % 100 %	40 Org 65 org	120 Org 195 Org	200 % 300 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja/jejaring dapat bersinergi dengan P2TP2A	-	14 mitra kerja/jejaring	14 mitra kerja/jejaring	14 mitra kerja/jejaring	100 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 mitra kerja / jejaring	70 Org	70 Org	70 Org	100 %	14 mitra kerja / jejaring	-	-
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 mitra kerja / jejaring	70 Org	70 Org	70 Org	100 %	14 mitra kerja / jejaring	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan	10 org	10 Org	10 Org	10 Org	-	10 Orang	30 org	300 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan	43 Orang	33 Org	33 Org	33 Org	100 %	43 Orang	113 Org	262 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	-	-	-	-	3 Orang	-	-
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	30 Org	30 Org	30 Org	100 %	40 orang	100 Org	133 %
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	49,34%	16,45 %	16,45 %	16,45 %	100 %	38,89%	71,79 %	1,45 %
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	72 orang	72 Org	72 Org	72 Org	100 %	72 Orang	216 Org	300 %
		Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kab/kota	72 orang	36 Org	36 Org	36 Org	100 %	72 orang	144 Org	200 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	36 Org	36 Org	36 Org	100 %	-	-	-
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	93,75%	89,58 %	89,58 %	89,58 %	100 %	91,67%	270 %	2,8 %
		Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	1 buku	3 Buku	300 %
		Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	1 buku	3 Buku	300 %
		Program Pemenuhan Hak Anak	33,96%	27,78 %	27,78 %	27,78 %	100 %	33,33%	88,89 %	2,62 %
			10,56%	6,58 %	6,58 %	6,58 %	100 %	8,55%	21,71 %	3,30 %
		Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	136 Orang	80 Org	80 Org	80 Org	100 %	136 Orang	296 Org	218 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak yang terlaksana	40 orang	40 Org	40 Org	40 Org	100 %	40 orang	120 Org	300 %
	Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Jumlah kepala desa yang dapat mengikuti monev terkait desa layak anak	40 orang	40 Org	40 Org	40 Org	100 %	40 Orang	120 Org	300 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	175 orang	175 Org	175 Org	175 Org	100 %	175 Orang	525 Org	300 %
	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah Lintas Sektor yang Memahami Kualitas Hidup Anak	95 orang	95 Org	95 Org	95 Org	100 %	95 Orang	285 Org	300 %
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak yang Terlaksana	50 orang	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	50 Orang	150 %	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	hidup anak tingkat daerah kab/kota									
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	30 Orang	30 Org	30 Org	30 Org	100 %	30 orang	90 Org	300 %
	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	41,82%	39,62 %	39,62 %	39,62 %	100 %	40,74%	119 %	2,9 %
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	95 orang	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	95 Orang	195 Org	205 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah remaja yang mengikuti sosialisasi pernikahan anak	30 orang	-	-	-	-	30 Orang	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan	- Jumlah korban yang mendapat atensi (APBD)	10 orang	10 Org	10 Org	10 Org	100 %	10 Orang	30 Org	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan / TPPO (DAK NON FISIK BIDANG PP)	10 orang	65 Org	65 Org	65 Org	100 %	65 orang	195 Org	195 %
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	171 Org	171 Org	171 Org	100 %	125 Orang	467 Org	373 %
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota P2TP2A yang Mengikuti Rakor	50 orang	-	-	-	-	50 orang	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	- Jumlah forum anak yang memahami tentang perlindungan khusus anak	10 orang	56 Org	56 Org	56 Org	100 %	56 orang	168 Org	168 %
		- Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	25 orang	10 Org	10 Org	2 Org	20 %	10 orang	22 Org	88 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					(DAK NON FISIK BIDANG PP)								
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota P2TP2A yang Memberikan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan	25 orang	25 Org	25 Org	25 Org	100 %	25 Orang	75 Org	300 %
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	148 Org	148 Org	148 Org	100 %	108 Orang	404 Org	374 %
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	108 Org	108 Org	108 Org	100 %	108 Org	324 Org	300 %
				Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300 %
				Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang	100 Org	170 Org	170 Org	170 Org	100 %	100 orang	440 Org	440 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK								
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	170 Org	170 Org	170 Org	100 %	100 orang	272 Org	272 %
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk dan mendapatkan sosialisasi dan advokasi kependudukan	5 sekolah	-	-	-	-	-	-	-
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan	1.169.760 jiwa	1.169.760 jiwa	1.170.748 jiwa	1.170.748 jiwa	100 %	1.169.760 jiwa	3.510.268 jiwa	300 %
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah sarana prasarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	-	-	-
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil program KKBPK yang tersusun	1 Buku	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 buku	3 Buku	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Kampung KB 38 Kampung KB yang mempunyai rumah data program KKBPK	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	100 %	38 kampung	114 Kampung KB	300 %
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pendataan yang Memahami Teknis Pendataan	80 Org	65 Org	65 Org	100 %	80 orang	210 Org	262 %
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Peserta KB Baru, KB Aktif, KB Droup Out sisa PUS Anmet Neet yang Dievaluasi KB	120 Org	97 Org	97 Org	100 %	120 orang	314 Org	261 %
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pengelola Data yang Memahami Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	130 Org	105 Org	105 Org	100 %	130 orang	340 Org	261 %
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,52%	80,55 %	80,55 %	100 %	80,56%	241,66 %	300 %
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program KKBPK	50 media komunikasi	50 Media Komunikasi	50 Media Komunikasi	100 %	50 media komunikasi	150 Media Komunikasi	300 %
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder dan Mitra Kerja yang Mendapat Advokasi tentang Program KKBPK	50 orang	50 Org	50 Org	100 %	50 orang	150 Org	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyediaan dan Pendistribusian Sarana KIE Program KKBPK (DAK Non Fisik)	-	50 sarana/media KIE	50 sarana/media KIE	50 sarana/media KIE	100 %	-	-	-
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	50 media komunikasi	77 media komunikasi	77 media komunikasi	77 media komunikasi	100 %	50 media komunikasi	204 media komunikasai	254 %
		Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	50 media massa	50 media massa	50 media massa	50 media massa	100 %	50 media massa	150 Media massa	300 %
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (MiniloK)	200 orang	100 org	100 org	100 org	100 %	200 orang	400 Org	200 %
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik)	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	100 %	18 balai penyuluh	54 Balai penyuluh	300 %
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas	60 Orang	60 Org	60 Org	60 Org	100 %	60 Orang	180 Org	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Lapangan KB (PKB/PLKB)									
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IPM yang dibina program KKBPK oleh PLKB	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	100 %	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	5.484 kader PPKBD dan Sub PPKBD	300 %
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana prasarana pendukung operasional PKB/PLKB	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	-	0
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)	Jumlah Penyuluh PKB / PLKB yang Mendapat Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	65 orang	18 balai penyuluh KB	18 balai penyuluh KB	18 balai penyuluh KB	100 %	65 orang	-	-
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)	Jumlah PUP, pemakaian kontrasepsi, kelompok tribina, UPPKS, PIK R dapat di tingkatkan	2.315 orang	2.315 orang	2.315 orang	2.315 orang	100 %	2.315 orang	6.945 org	300 %
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alokon	26.929 alokon	59.330 alokon	59.330 alokon	100 %	26.929 alokon	145.589 alkon	540 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jaringannya (DAK NON FISIK)	- Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP - Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	42 faskes 120 Orang	126 faskes -	126 faskes -	126 faskes -	100 % 100 %	42 faskes 120 orang	294 faskes -	700 % -
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Jumlah Pengguna MKJP yang Meningkatkan lewat Promosi Program KKBPK - Jumlah pengguna MKJP yang meningkat lewat promosi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan	64.801 orang 209 akseptor	36 Org 3470 Akseptor	36 Org 3338 Akseptor	36 Org 3338 Akseptor	100 % 96 %	108 orang 209 Akseptor	180 Org 6.885 Akseptor	0,28 % 32,94 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					dan Keluarga Berencana) (DAK NON FISIK BOKB)								
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Petugas Faskes dan Petugas KB yang Memahami Kebutuhan Alkon	108 orang	36 Org	36 Org	36 Org	100 %	108 orang	180 Org	166 %
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Operasional PLKB/PKB	3 jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	3 jenis	5 jenis	166 %
				Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Kelangsungan ber- KB Meningkat	480 akseptor	360 akseptor	360 akseptor	360 akseptor	100 %	480 akseptor	1.200 akseptor	720 %
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Pelayanan KB yang Dapat Ditingkatkan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	43 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	100 %	43 Faskes	127 faskes	295 %
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah KB Pasca Persalinan Meningkat	150 orang	120 org	120 org	120 org	100 %	175 orang	415 org	276 %
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Mutu dan Kualitas Pelayanan KB Meningkat	150 akseptor	120 tenaga pelayanan	120 tenaga pelayanan	120 tenaga pelayanan	100 %	150 tenaga pelayanan	390 tenaga pelayanan	260 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Baru Pria Meningkat	40 akseptor	88 akseptor	88 akseptor	100 %	150 akseptor	326 akseptor	8,15 %
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	100 %	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	5.484 kader PPKBD dan Sub PPKBD	300 %
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah lintas sektor yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB	38 Lintas Sektor	-	-	-	38 Lintas Sektor	-	-
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kerja Sama Lintas Sektor tentang Program KKBPK di Kampung KB	180 lintas sektor	100 lintas sektor	100 lintas sektor	100 %	180 lintas sektor	380 lintas sektor	380 %
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK)	Jumlah biaya operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang terpenuhi	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	100 %	38 Kampung KB	114 Kampung KB	300 %
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	Jumlah biaya operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan	38 kampung KB	38 kampung KB	38 kampung KB	100 %	38 Kampung KB	114 Kampung KB	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK BOKB)	Keluarga Sejahtera yang terpenuhi							
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97,81%	97,75 %	97,75 %	100 %	97,81%	293 %	299 %
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	1.066 Kelompok	1.066 Kelompok	549 Kelompok	100 %	1.066 Kelompok	2.164 kelompok	203 %
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok BKB yang dibina	100 Orang	250 Org	250 Org	100 %	100 orang	850 org	850 %
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah sarana penugasan DAK Fisik yang terpenuhi (Pengadaan Kit Siap Nikah dan BKB Kit Stunting)	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	6 jenis	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	(BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola kelompok BKB, BKR, BKL yang di latih	100 Orang	322 Org	250 Org	250 Org	100 %	100 orang	600 Org	500 %
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah remaja yang mendapat advokasi	100 Orang	100 Org	100 Org	100 Org	100 %	100 orang	300 org	300 %
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sasaran poktan BKB yang mendapatkan promosi dan sosialisasi	90 orang dan 36 Desa Lokus Stanting	54 Org	54 Org	54 Org	100 %	90 orang dan 36 Desa Lokus Stanting	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (APBD DAN DAK NON FISIK BOKB)	- Jumlah Pengelola Kelompok UPPKS yang Terpenuhi - Jumlah sasaran poktan BKB (orang tua hebat) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi (DAK NON FISIK BOKB) - Jumlah sasaran poktan, BKB, BKL, BKR, UPPKS dan PIK-R yang mendapatkan promosi dan sosialisasi tentang Kespro dan Stanting (DAK NON FISIK BOKB)	36 Kelompok 1.000 Org 100 Org	12 Kelompok 1.000 Org 100 Org	12 Kelompok 1.000 Org 100 Org	12 Kelompok 1.000 Org 100 Org	100 % 100 % 100 %	36 Kelompok 1.000 Org 100 Org	60 kelompok 3.000 org 300 org	166 % 300 % 300 %
				Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah anggota kelompok poktan BKL yang aktif	90 Orang	54 Org	54 Org	54 Org	100 %	90 orang	198 org	220 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Orang	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	50 Org	150 Org	150 %
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Orang	150 Org	150 Org	150 Org	100 %	50 Orang	350 Org	700 %
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	50 Orang	150 Org	150 Org	150 Org	100 %	50 Orang	350 Org	700 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bidang Keluarga Berencana

Capaian Indikator Kinerja (Renstra DP2KBP2 2016-2021)

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah periode 2016 – 2021 menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang diratifikasi oleh pemerintah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 sebesar 79,20% dapat direalisasi sebesar 79,87 % atau 100 %

2. Prosentase Keluarga Sejahtera

Target Prosentase Keluarga Sejahtera tahun 2020 sebesar 99,00% dapat direalisasi sebesar 100 % atau 101 %

3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif

Target Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2020 sebesar 78,85% dapat direalisasi sebesar 80,62 % atau 102 %

4. Prevalensi peserta KB aktif

Target Prevalensi peserta KB aktif tahun 2020 sebesar 78,85% dapat direalisasi sebesar 80,62 % atau 102 %

5. Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan

Target Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan tahun 2020 target untuk 1 petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) membawahi 2 desa sedangkan realisasi tahun 2020 sampai dengan sekarang, 1 petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) membawahi desa 5

6. Rasio Anak Perempuan Terhadap Anak Laki - Laki di Tingkat Pendidikan Dasar, Lanjutan dan Tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi
Untuk Rasio Anak Perempuan Terhadap Anak Laki - Laki di Tingkat Pendidikan Dasar, Lanjutan dan Tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2
7. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki usia 15 -24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki - Laki (indeks melek huruf gender)
Untuk Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki usia 15 -24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki - Laki (indeks melek huruf gender) bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2
8. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor pertanian
Untuk Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor pertanian bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2
9. Proporsi Kursi DPR yang Diduduki Perempuan
Untuk proporsi Kursi DPR yang Diduduki Perempuan bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2

Capaian Program Prioritas RPJMD (2016-2021)

- Jumlah lembaga berbasis gender yang diberdayakan
Target lembaga berbasis gender yang diberdayakan Tahun 2021 sebesar 54 OPD dapat direalisasi sebesar 54 OPD atau sebesar 100 %
- Jumlah peserta KB baru
Target jumlah peserta KB baru sebesar 40.220 pada tahun 2021 dapat direalisasi sebesar 41.204 atau 102 %
- Jumlah peserta KB aktif
Target jumlah peserta KB aktif sebesar 155.644 pada tahun 2021 dapat direalisasi sebesar 199.545 atau sebesar 128 %

- Pembinaan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita di masyarakat.

Target pembinaan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok BKB target sebesar 408 kelompok dapat direalisasi sebesar 54 kelompok atau 13,24 %

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional / Formula Perhitungan	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN
				2020	2021		
1.	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Prevalensi KB Aktif	$\frac{a}{b} \times 100 \%$ a. Jumlah Peserta KB Aktif (PA) b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	80,52%	80,87%	Program Penyuluhan dan Penggerakan	1. Pelayanan KIE 2. Operasional PPKBD dan Sub PPKBD 3. Penunjang DAK Bidang KB 4. Bantuan Operasional KB 5. Lomba Penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera 6. Penunjang BOKB 7. Sosialisasi Program KKBPK untuk Wartawan 8. Pelatihan Metode KB bagi PUS 9. HARAGANAS 10. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil 11. Pengadaan Sarana Prasarana (DAK Fisik)
						Program Keluarga Berencana	1. Peningkatan Akseptor KB 2. Pembinaan Akseptor KB 3. Kesatuan Gerak PKK - KB - Kesehatan 4. Peningkatan Mutu Pelayanan KB 5. Pelayanan KB MKJP
						Program Pengendalian Penduduk	1. Evaluasi Monitoring Program KB 2. Pendataan dan Pengolahan Data Keluarga 3. Bintek Pencatatan dan Pelaporan Program KB 4. Penyusunan Parameter kependudukan dan profil kampong KB 5. Rakerda 6. Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja Program KKBPK
2.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif	$\frac{a}{b} \times 100 \%$ a. Jumlah Peserta KB Aktif (PA) b. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	73,27%	73,27%	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. BKB dan Evaluasi 2. BKR 3. BKL 4. Tribina kel. BKL terbaik 5. Advokasi dan KIE KRR 6. Pembinaan Kelompok UPPKS 7. Safari Ramadhan
						Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi Operasional Kabupaten Layak Anak 2. Peningkatan bagi SDM Paralegal 3. Fasilitasi P2TP2A

							4. Lomba Gugus Tugas PPA Desa
							5. Fasilitasi Forum Anak
							6. Monitoring PPRG
							7. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG
							8. Pelatihan Wirausaha bagi PEKKA
							9. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
							10. Operasional Rumah Aman

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Mojokerto

NO	IINDIKATOR	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prevalensi Peserta KB Aktif	-	-	-	80,52 %	80,00 %	80,00 %	80,62 %	80,55 %	-	-	Data di dapat berdasarkan jumlah PUS sebanyak 247.373 dan jumlah peserta KB aktif (yang ikut IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntuk dan Pil) sebanyak 199.545
2	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif	-	-	-	73,27 %	73,27 %	73,27 %	73,27 %	73,27 %	-	-	Data di dapat berdasarkan jumlah kelompok Tribina, PIK R, UPPKS, Perlindungan Perempuan yang Aktif sebanyak 1.539 Kelompok dan Jumlah Kelompok yang Ada 2.174 Kelompok

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Disadari sepenuhnya dalam era otonomi daerah, walaupun tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara umum telah dilaksanakan sepenuhnya namun dalam tahun 2021 hal-hal yang masih memerlukan perhatian secara khusus antara lain :

1. Salah satu dampak dari era otonomi adalah terjadinya mutasi personil baik keluar maupun kedalam struktur kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terutama petugas lapangan KKBPK (Koordinator dan Penyuluh KKBPK) dan tenaga atau pejabat baru yang memerlukan pelatihan / orientasi program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSOM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KB / KR dan program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin dan penduduk rentan lainnya
4. Keberadaan Kampung KB yang relatif masih baru memerlukan perhatian khusus agar keberadaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam memberikan informasi dan edukasi tentang Program KKBPK.
5. Maraknya pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja akhir-akhir ini menjadi tantangan bagi KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan yang cukup berat untuk diselesaikan. Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat-sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif semua elemen terkait serta partisipasi masyarakat.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.

2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
3. Peran dan fungsi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD kurang maksimal dalam membantu pelaksanaan program di tingkat desa atau dusun, karena sering terjadinya pergantian petugas PPKBD dan Sub PPKBD dan banyak yang merangkap menjadi kader lain, sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan dan pemahaman serta kinerja terhadap program.
4. Belum semua kader BKR dan PIK R memahami tentang program Genre terutama triad KRR (pernikahan dini, seks pra nikah, napza) sehingga berdampak pada kesehatan reproduksi remaja.
5. Pemahaman keluarga tentang pendidikan balita serta kesejahteraan dan kesehatan lansia masih kurang sehingga kegiatan BKB dan BKL kurang optimal.
6. Jumlah petugas lapangan KB sangat kurang untuk mendukung operasional pelaksanaan program di lapangan, sehingga sangat mempengaruhi hasil capaian kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP).

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih menjadi satu dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2)
2. Shelter atau titipan sementara belum berfungsi secara optimal
3. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas dalam bidang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Perlindungan Perempuan
4. Masih banyak P2TP2A tingkat kecamatan yang tidak berfungsi dan tidak melaporkan kejadian yang ada
5. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal.
6. Masih kurangnya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada mitra kerja.

7. Belum adanya data terpilah tentang gender.

Sedangkan Isu – Isu strategis strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
4. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi.
5. Bertambahnya usia perkawinan ideal.
6. Berambahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
7. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL).
8. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
9. Bertambahnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.
10. Bertambahnya kualitas data yang cepat dan akurat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DP2KBP2	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi	84,28 (A) 1 Inovasi	6.354.423.390	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DP2KBP2	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi	84,28 (A) 1 Inovasi	6.042.724.775	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	15.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	12.700.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	86%	5.516.800.990	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	86%	5.591.681.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	65,57%	65.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	65,57%	-	

	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	258.000.000	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	148.721.375	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	249.622.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	139.622.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	250.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	150.000.000	
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	82,14%	310.000.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	82,14%	69.813.125	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	150.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	35.000.000	
	Pembedayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	40 Orang	60.000.000	Pembedayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	40 Orang	-	

	Kabupaten/Kota										
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	100.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	34.813.125	
3	Program Perlindungan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	395.489.000	Program Perlindungan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	134.243.450	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	77.155.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	50.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 Mitra Kerja / Jejaring	218.344.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 Mitra Kerja / Jejaring	74.243.450	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	DP2KBP2	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah	43 Orang	100.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	DP2KBP2	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah	43 Orang	10.000.000	

	Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan			Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan			
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP2KBP2	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa	49,34%	100.000.000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP2KBP2	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa	49,34%	10.000.000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	DP2KBP2	Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa	72 orang	100.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	DP2KBP2	Jumlah kepala desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat desa	72 orang	10.000.000	
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP2KBP2	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	93,75%	100.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP2KBP2	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	93,75%	25.000.000	
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	100.000.000	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	25.000.000	

6	Program Pemenuhan Hak Anak	DP2KBP2	Prosentase kecamatan layak anak	38,89%	268.267.400	Program Pemenuhan Hak Anak	DP2KBP2	Prosentase kecamatan layak anak	38,89%	79.537.000	
			Prosentase desa kelurahan layak anak	10,56%				Prosentase desa kelurahan layak anak	10,56%		
	Pelebagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	100.000.000	Pelebagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	59.760.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	175 orang	168.267.400	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di kabupaten Mojokerto	175 orang	19.777.000	
7	Program Perlindungan Khusus Anak	DP2KBP2	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	41,82%	590.489.000	Program Perlindungan Khusus Anak	DP2KBP2	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	41,82%	139.561.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	95 orang	57.155.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	95 orang	9.861.000	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	433.334.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	119.965.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	100.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	9.735.000	
8	Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP2	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	470.000.000	Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP2	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	264.698.850	
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam	DP2KBP2	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	200.000.000	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian	DP2KBP2	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	9.464.000	

	Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					Kuantitas Penduduk					
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	270.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	255.234.850	
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP2	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,56%	9.189.510.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP2	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,56%	9.708.063.200	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi program KKBPK	50 media komunikasi	1.782.010.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi program KKBPK	50 media komunikasi	1.199.815.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Org	2.896.700.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Org	2.500.724.200	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB	26.929 alkon	3.398.128.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB	26.929 alkon	2.327.024.000	

			di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP					di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP			
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.112.672.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	680.500.000	
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP2KBP2	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97,81%	2.607.400.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP2KBP2	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97,81%	5.267.046.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	1066 Kelompok	2.407.400.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	1066 Kelompok	5.247.204.000	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Orang	200.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Orang	19.842.000	

	Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 2 (dua) pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah dan masyarakat. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2023 :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2022
Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender		
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi wanita dalam lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	Perempuan Desa yang mendapatkan edukasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pembangunan, ekonomi, social, politik dan hokum (Usulan PUSPA) (TEMATIK PUG)
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Prosentase Kepala Desa yang mendapatkan		

			pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di Desa		
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat desa		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	Peningkatan IPM dan IDG Kabupaten Mojokerto serta peran perempuan dalam musrenbang tingkat desa (Usulan PUSPA) (TEMATIK PUG)
	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Memahami anak atau remaja tentang bahayanya HIV AIDS dan pernikahan dini (Usulan PUSPA) (TEMATIK PUG)
3.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Prosentase kecamatan layak anak		
			Prosentase desa kelurahan layak anak		
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto		
	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jambore anak (Usulan Forum Anak Majapahit) (TEMATIK KLA) - Anggaran di DP3AK Propinsi tidak ada, dalam kegiatan yang sama di DP3AK, Forum anak daerah di undang untuk mengikuti kegiatan dimaksud (Kegiatan yang sama dengan usulan Daerah)

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2023 ada usulan program dan kegiatan Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Profinsi

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan makmur. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tujuan pembangunan program KB Nasional di masa mendatang adalah meningkatkan kualitas program KB untuk memenuhi hak – hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran agar terwujudnya keluarga berkualitas.

Dalam Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang menitik beratkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan dimana penduduk bukan hanya sebagai obyek pembangunan tapi juga sebagai subyek sekaligus sebagai menikmati pembangunan, maka dalam hal ini :

1. Kualitas penduduk harus dikendalikan
2. Kualitas penduduk harus ditingkatkan
3. Mobilitas penduduk harus diarahkan dan
4. Data penduduk harus tersedia by name by adres

Dalam RPJMD 2015 – 2019 Pemerintah telah menerapkan 9 prioritas pembangunan yang dikenal dengan Nawacita dan yang berkaitan dengan program KB adalah **Nawacita ke – 3** “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka NKRI”, **Nawacita ke – 5** “ Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia “, Nawacita ke – 8 “Melakukan revolusi karakter bangsa”.

Sebagai implementasi dari Nawacita tersebut ada Rencana Strategis 2016 - 2021 dan sasaran strategis yang harus di capai dan dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
2. Menurunnya angka TFR
3. Meningkatkan capaian peserta KB Aktif
4. Menurunkan kebutuhan KB yang tidak terlayani
5. Menurunnya angka kelahiran pada usia remaja kelompok umur 15 – 19 tahun
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (15 – 45 Tahun)

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB secara merata di semua tingkat wilayah.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023

a. Tujuan

Maksud dengan disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, sehingga para pelaksana pembangunan daerah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan tujuan agar :

- Keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 adalah :

- Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program dan Kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari Kegiatan:
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari kegiatan :
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari kegiatan :
- Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari kegiatan :
- Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pemenuhan Hak Anak terdiri dari kegiatan :
- Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari kegiatan :
- Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Pengendalian Peduduk terdiri dari kegiatan :
- Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari kegiatan :
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya local
 - Pemberdayaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber – KB
- i. Program Pembedayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari kegiatan :
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

TABEL T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DP2KBP2	84,28 (A)	6.042.724.775			84,78 (A)	6.374.303.400
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi				1 Inovasi	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	DP2KBP2	90%	12.700.000	APBD		90%	15.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP2KBP2	2 dokumen	7.500.000	APBD		2 dokumen	7.500.000
	<u>Rincian :</u>								
	Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja		1 dokumen	3.500000			1 dokumen	3.500000
	Penyusunan P-Renja	Jumlah Dokumen Penyusunan P- Renja		1 dokumen	4.000.000			1 dokumen	4.000.000

			Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 laporan	5.200.000			8 laporan	7.500.000
			Rincian :								
			LKJiP	Jumlah laporan		1 laporan	500.000			1 laporan	1.000.000
			RB	Jumlah laporan		1 laporan	3.00.000			1 laporan	300.000
			SAKIP	Jumlah laporan		1 laporan	3.000.000			1 laporan	4.800.000
			LKPJ	Jumlah laporan		1 laporan	300.000			1 laporan	300.000
			Evaluasi triwulan	Jumlah laporan		4 laporan	3.00.000			4 laporan	300.000
			LPPD	Jumlah laporan		1 laporan	3.00.000			1 laporan	300.000
			CALK	Jumlah laporan		1 laporan	5.00.000			1 laporan	500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	DP2KBP2	86%	5.591.681.000	APBD		87%	5.591.681.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DP2KBP2	36 orang	5.591.681.000	APBD		36 orang	5.591.681.000
			Rincian :								
			Gaji ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji		36 Orang/bulan	3.173.379.000			36 Orang/bulan	3.173.379.000
			Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan		36 Orang/bulan	2.298.600.000			36 Orang/bulan	2.298.600.000
			Honor Pengelola Keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang mendapat honor		8 Orang/bulan	119.702.000			8 Orang/bulan	119.702.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP2KBP2	90%	148.721.375	APBD		90%	318.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP2KBP2	14 Paket	12.000.000	APBD		14 Paket	110.000.000
			Rincian :								
			Beli AC, PC, Printer, laptop	Jumlah paket		14 Paket	12.000.000			14 Paket	110.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Mamin yang Di Sediakan	DP2KBP2	168 paket	12.000.000	APBD		168 paket	12.000.000
			Rincian :								
			Makan minum rapat	Jumlah paket untuk mamin rapat		168 paket	12.000.000				12.000.000

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DP2KBP2	4 paket	25.000.000	APBD		4 paket	41.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Cetak map, amplop, blanco dan lembar disposisi	Jumlah paket cetak untuk kelengkapan kantor		4 paket	25.000.000			4 paket	41.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DP2KBP2	6 dokumen	9.000.000	APBD		6 dokumen	9.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Beli koran	Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan		6 dokumen	9.000.000			6 dokumen	9.000.000
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DP2KBP2	4 Paket	33.721.375	APBD		4 Paket	29.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Beli ATK			4 paket	29.000.000			4 paket	29.000.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DP2KBP2	12 laporan	7.000.000	APBD		12 laporan	4.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Makan minum tamu	Jumlah laporan rapat perbulan		12 laporan	7.000.000			12 laporan	7.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP2KBP2	119 laporan	50.000.000	APBD		119 laporan	110.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Biaya dinas luar dan dalam daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas perbulan		119 laporan	50.000.000			119 laporan	110.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	DP2KBP2	90%	30.000.000	APBD		90%	60.000.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6 unit	-			12 unit	60.000.000
			<u>Rincian :</u>								

				Meja Rapat	Jumlah paket		6 unit	30.000.000			12 unit	60.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	DP2KBP2	90 %	139.622.400	APBD		249.622.400	249.622.400
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DP2KBP2	12 laporan	75.000.000	APBD		12 laporan	75.000.000
				<u>Rincian :</u>								
				Bayar listrik	Jumlah laporan bayar listrik perbulan		12 laporan	65.100.000			12 laporan	65.100.000
				Bayar telpon dan internet	Jumlah laporan bayar telpon perbulan		12 laporan	9.900.000			12 laporan	9.900.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP2KBP2	12 laporan	64.622.400	APBD		12 laporan	64.622.400
				<u>Rincian :</u>								
				Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 5 orang	Jumlah laporan untuk honor THL		12 laporan	64.622.400			12 laporan	64.622.400
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	DP2KBP2	90 %	150.000.000	APBD		90 %	250.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DP2KBP2	182 unit	105.000.000	APBD		182 unit	105.000.000
				<u>Rincian :</u>								
				Service mobil dan motor	Jumlah kendaran mobil yang di servies		182 unit (6 mobil, 176 motor)	21.319.500			182 unit (6 mobil, 176 motor)	21.319.500
				Pajak Kendaraan roda dua dan roda 4 dan service kendaraan	Jumlah kendaran mobil dan motor yang dibayrkan pajaknya		182 unit (6 mobil, 176 motor)	38.900.000			182 unit (6 mobil, 176 motor)	38.900.000
				BBM dan olie kendaraan roda 4	Jumlah kendaran mobil yang dimendapat BBM		6 mobil	39.586.725			6 mobil	39.586.725
				Ban mobil	Jumlah kendaran mobil yang diganti ban		1 mobil	3.092.000			1 mobil	3.092.000
				Accu mobil	Jumlah kendaran mobil yang diganti accu		1 mobil	2.101.775			1 mobil	2.101.775

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP2KBP2	3 gedung	25.000.000	APBD		3 Gedung	125.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Rehab dan cat gedung kantor	Jumlah gedung yang di rehab		3 gedung	25.000.000			3 Gedung	125.000.000
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP2KBP2	21 Unit	20.000.000	APBD		21 Unit	20.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Service AC, printer, laptop, PC dll	Jumlah unit peralatan kantor yang diperbaiki		21 Unit	20.000.000			21 Unit	20.000.000
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	DP2KBP2	82,14%	69.813.125	APBD		83,93%	216.832.400
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	DP2KBP2	86 OPD	35.000.000	APBD		86 OPD	75.000.000
			Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	57 Dokumen	10.000.000	APBD		57 Dokumen	25.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Pelatihan PPRG untuk bidang - bidang di DP2KBP2 (TEMATIK PUG)								
			Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	36 Perangkat Daerah	25.000.000	APBD		36 Perangkat Daerah	50.000.000

				<u>Rincian :</u>								
				Pelatihan PPRG untuk bidang - bidang di seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto (TEMATIK PUG)								
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	DP2KBP2	90 orang	34.813.125	APBD		90 orang	141.832.400
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	DP2KBP2	18 Lembaga	24.813.125	APBD		50 Org	50.000.000
				<u>Rincian :</u>								
				Bintek Peningkatan kapasitas organisasi perempuan dan perempuan pengambil kebijakan (TEMATIK PUG)								
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	DP2KBP2	35 Org	-	APBD		35 Org	57.400.000
				<u>Rincian :</u>								
				Perempuan Desa yang mendapat edukasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pembangunan, ekonomi, social, politik dan hukum (Usulan PUSPA) (TEMATIK PUG)								
				Pengembangan Komunikasi, Informasi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan	DP2KBP2	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	34.432.400

				dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia						
				<u>Rincian :</u>							
				Sosialisasi Perda PUG (TEMATIK PUG)							
				Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	DP2KBP2	100%	134.243.450	APBD	100%	175.000.000
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	DP2KBP2	65 orang	50.000.000	APBD	65 orang	50.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	50.000.000	APBD	1 Dokumen	50.000.000
				<u>Rincian :</u>							
				Honor P2TP2A (honor penjaga selter, psikolog, pengacara, admin website) Honor PPTK (TEMATIK PUG)							
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	DP2KBP2	15 Mitra Kerja / Jejaring	74.243.450	APBD	15 Mitra Kerja / Jejaring	100.000.000
				Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	DP2KBP2	54 Orang	49.673.750	APBD	54 Orang	50.000.000

			bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan							
			<u>Rincian :</u>								
			Rakor P2TP2A (fasilitasi pengembangan P2TP2A) (TEMATIK PUG)								
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	3 Layanan	24.569.700	APBD		3 Layanan	50.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan rumah aman yang tercukupi dan korban yang mendapatkan penanganan serta pengurus gugus tugas yang cakap dalam pendampingan	DP2KBP2	36 Orang	10.000.000	APBD		36 Orang	25.000.000
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	DP2KBP2	36 Orang	10.000.000	APBD		36 Orang	25.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Bimbingan teknis pendidikan karanker keluarga (peserta								

				pengurus gugus tugas PPA Desa) (TEMATIK PUG)							
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa	DP2KBP2	49,34%	10.000.000	APBD		65,79% 275.000.000
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Jumlah kepala desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat desa	DP2KBP2	72 orang	10.000.000	APBD		72 orang 275.000.000
				Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	57 Perangkat Daerah	10.000.000	APBD		72 orang 25.000.000
				<u>Rincian :</u>							
				Pelatihan PPRG untuk sekretaris desa di Kabupaten Mojokerto (TEMATIK PUG)							
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	DP2KBP2	4 Dokumen	-	APBD		4 Dokumen 100.000.000
				<u>Rincian :</u>							
				Meningkatnya IPM dan IDG Kabupaten Mojokerto serta peran perempuan dalam musrenbang tingkat Desa (Usulan PUSPA) (TEMATIK PUG)							
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas	DP2KBP2	4 Laporan	-	APBD		4 Laporan 150.000.000

			Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DP2KBP2	27 Organisasi	9.880.000	APBD		27 Organisasi	25.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Fasilitasi Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto (TEMATIK KLA)								
			Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	49.880.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Pelaksanaan lomba KLA tingkat Nasional (TEMATIK KLA untuk fasilitasi monitoring dan evaluasi KLA)								
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di kabupaten Mojokerto	DP2KBP2	125 orang	19.777.000	APBD		125 orang	52.602.900
			Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	95 orang	9.868.000	APBD		95 orang	25.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Pelatihan KHA (TEMATIK KLA)								
			Pengembangan Komunikasi, Informasi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan	DP2KBP2	1 Dokumen	9.909.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000

				dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
				<u>Rincian :</u>							
				Koordinasi dengan jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan Hak Anak di tingkat Kabupaten (TEMATIK KLA)							
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	32.602.900
				<u>Rincian :</u>							
				Jambore Anak (Usulan FORUM ANAK MAJAPAHIT) (TEMATIK KLA)							
				Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	DP2KBP2	41,82%	139.561.000	APBD	42,86%	590.489.000
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas yang mengikuti rakor TPPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	DP2KBP2	30 Orang	9.861.000	APBD	30 orang	57.155.000
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	15 Perangkat Daerah	9.861.000	APBD	15 Perangkat Daerah	10.000.000
				<u>Rincian :</u>							

				Koordinasi lintas sektor dengan pembentukan FDG (TEMATIK KLA)								
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	DP2KBP2	125 Orang	119.965.000	APBD		125 Orang	160.463.900
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	5 Orang	9.965.000	APBD		50 orang	50.463.990
				<u>Rincian :</u>								
				Untuk pelayanan terhadap korban kekerasan (TEMATIK KLA)								
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	10 Layanan	50.000.000	APBD		10 Layanan	50.000.000
				<u>Rincian :</u>								
				Honor Narasumber dan sosialisasi kegiatan pencegahan kekerasan								
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Peneyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000

					<u>Rincian :</u>							
					Honor P2TP2A (Lembaga bantuan hukum, sikolog, pengacara, penerima dan pencatat pengaduan kasus), Honor PPTK, Honor Tim Keanggotaan P2TP2A, Beli ATK Kegiatan (TEMATIK KLA)							
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	DP2KBP2	108 orang	9.735.000	APBD		108 orang 10.000.000
					Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	18 Laporan	9.735.000	APBD		18 Laporan 10.000.000
					<u>Rincian :</u>							
					Sosialisasi Desa Layak Anak (TEMATIK KLA)							
					Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	DP2KBP2	100%	264.698.850	APBD		100% 406.865.000
					Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas sektor yang melaksanakan koordinasi program KKBPK	DP2KBP2	100 Org	9.464.000	APBD		100 Org 10.000.000

				1.Evaluasi Laporan Bangga Kencana (bentuk buku laporan) (APBD)							
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	DP2KBP2	1 Laporan	24.446.000		1 Laporan	50.000.000
				<u>Rincian :</u>							
				Bimbingan teknis bagi PKB/PLKB dalam pencatatan dan pelaporan NEW SIGA							
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	DP2KBP2	80,56%	6.708.063.200		80,58%	7.456.994.000
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program KKBPK	DP2KBP2	144 Orang	1.199.815.000		144 Orang	1.432.010.000
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DP2KBP2	12 Organisasi	4.375.000		12 Organisasi	50.000.000
				<u>Rincian :</u>							
				Rapat Peningkatan program Bangga Kencana dan Kespro kepada lintas sektor dan Koordinator PLKB							
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK Non Fisik)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP2KBP2	1 Dokumen	25.000.000		1 Dokumen	25.000.000

				<u>Rincian :</u>								
				Promosi program Bangga Kencana dengan Media KIE (cetak benner, roll benner, gerak mupen)								
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP2KBP2	2 Dokumen	95.640.000			2 Dokumen	120.640.000
				<u>Rincian :</u>								
				1.Promosi program Bangga Kencana dengan Media KIE (APBD)								
				2.Promosi program Bangga Kencana dengan Media KIE (DAK NON FISIK)								
				Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media Massa Cetak Elektronik dan Media Lainnya yang Digunakan Promosi sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	DP2KBP2	9 Media Massa	-			9 Media Massa	50.000.000
				<u>Rincian :</u>								
				Publikasi dan Iklan melalui media massa cetak dan radio								
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (MiniloK)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	DP2KBP2	2 Laporan	305.800.000			2 Laporan	417.370.000

					(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
					<u>Rincian :</u>								
					1. Sosialisasi program Bangga Kencana melalui HARGANAS (HARI KELUARGA NASIONAL) (APBD)								
					2. Rakorcam, Rakordes, Minilok (DAK NON FISIK BOKB)								
					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	DP2KBP2	1 Laporan	729.000.000			1 Laporan	729.000.000
					<u>Rincian :</u>								
					Meningkatkan kualitas pengelolaan program (Kader, Pokja Kampung KB, Penyuluh KB) di balai penyuluhan dan Kampung KB (Rapat lini lapangan, rapat operasional penyuluhan KB, pembinaan kader, pengolahan data, mamin, transport pertemuan, honor fasilitator, banner) (DAK NON FISIK)								
					Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	DP2KBP2	1 Laporan	40.000.000			1 Laporan	40.000.000
					<u>Rincian :</u>								
					Rapat pengendalian program KKBPK dan makan minum								

				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang mendapat pembinaan program KKBPK	DP2KBP2	60 Org	2.500.724.200			60 Org	2.867.700.000
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DP2KBP2	1 Organisasi	900.000.000			1 Organisasi	900.000.000
				<u>Rincian :</u>								
				Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD								
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	DP2KBP2	3 Unit	99.764.200			3 Unit	100.000.000
				<u>Rincian :</u>								
				Penunjang DAK Fisik								
				Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DP2KBP2	1 Laporan	41.760.000			1 Laporan	50.000.000
				<u>Rincian :</u>								
				Sarana prasarana (ATK 18 Balai Penyuluh KB)								
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP2KBP2	1.828 orang	1.459.200.000			1.828 orang	1.459.200.000
				<u>Rincian :</u>								

				Honorarium pelaksana KIE untuk meningkatkan KB baru MKJP							
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	DP2KBP2	26.929 alkon	2.327.024.000		26.929 alkon	2.422.784.000
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jaringan (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP2KBP2	2 Laporan	43.900.000		2 Laporan	68.900.000
				<u>Rincian :</u>							
				1. Mencukupi kebutuhan ALKON di FASKES KB (distribusi alokon) (APBD)							
				2. Mencukupi kebutuhan ALKON di FASKES KB (distribusi alokon) (DAK)							
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (APBD dan DAK NON FISIK)		DP2KBP2	2.229 Orang	1.091.679.000		2.229 Orang	1.072.439.000
				<u>Rincian :</u>							
				1. Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan Peningkatan KB MKJP							
				2. Biaya penggerakan dan pelayanan KB (jasa medis, biaya transport penggerakan, biaya							

			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program KKBPK	DP2KBP2	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	680.500.000			1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	705.500.000
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DP2KBP2	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Interaksi lintas sektor dalam pengembangan program Bangga Kencana (bersama kepala Desa Kampung KB)								
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	DP2KBP2	38 kampung KB	680.500.000			38 kampung KB	680.500.000
			<u>Rincian :</u>								
			Rapat pelaksanaan pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB (rapat ketahanan keluarga, rapat pokja kampung KB, Transport pertemuan, honor fasilitator, ATK, leaflet)								
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase kelompok ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga yang aktif	DP2KBP2	97,86%	5.267.046.000			97,91%	5.407.520.000
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R	DP2KBP2	1066 Kelompok	5.247.204.000			1066 Kelompok	5.357.520.000

			Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	yang mendapat pembinaan						
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	DP2KBP2	3 Kelompok	19.921.000		3 Kelompok	50.000.000
			<u>Rincian :</u>							
			Lomba Duta Genre dan Pembinaan Duta Genre							
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	2 Unit	150.000.000		2 Unit	150.000.000
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola kelompok BKB, BKR, BKL yang di latih	DP2KBP2	1 Laporan	9.921.000		1 Laporan	10.000.000
			<u>Rincian :</u>							
			Pembinaan dan lomba kelompok BKB (PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH)							
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan	DP2KBP2	20 Orang	9.921.000		20 Orang	10.000.000

			(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
			<u>Rincian :</u>								
			Pembinaan Insan Genre dan Saka Kencana mengenai promosi program GENRE (Generasi Berencana)								
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	2.586 Orang	5.032.520.000			2.586 Orang	5.032.520.000
			<u>Rincian :</u>								
			Pulsa Paket Data, Transport TPK setiap kali kunjungan @ 10.00 x 2.586 Orang, (Transport pendampingan catin, Transport pendampingan ibu hamil, Transport pendampingan pasca persalinan) (DAK NON FISIK) (PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH)								
			Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Bangsa Kencana (Indeks Pembangunan Keluarga)	DP2KBP2	18 Dokumen	24.921.000			18 Dokumen	20.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Pelaksanaan pembinaan dan lomba kelompok BKL								

			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra Kerja yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	DP2KBP2	100 Orang	19.842.000			100 Orang	100.000.000
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	1 Laporan	9.921.000			1 Laporan	25.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Pembinaan kelompok BKR mengenai kesehatan reproduksi remaja (keluarga remaja)								
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	DP2KBP2	1 Laporan	9.921.000			1 Laporan	10.000.000
			<u>Rincian :</u>								
			Pembinaan kelompok PIK R mengenai kesehatan reproduksi remaja (pada remaja)								

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 sesuai dengan aplikasi SIPD (usulan prioritas dan cadangan) dengan pagu sementara yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp. 18.740.687.400,00** (Delapan Milyard Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Dengan Pagu Sementara Sebagaimana Pada Aplikasi SIPD
Kabupaten Mojokerto

KODE SKPD								2.08.01												
NAMA SKPD								DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
KODE								PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	U P	B/ L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
											OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	K L	Rp.	D/TB/DAK
1								2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	0	0						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84,28 (A)		6.042.724.775					
											Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi							
2	0	0	2	0				Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target		90%		12.700.000					

2	0	0	2	0	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		L	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	Kab. Mojokerto	7.500.000					
							<u>Rincian :</u>												
							Penyusunan Renja			Jumlah Dokumen Penyusunan Renja		1 dokumen		3.500000					
							Penyusunan P-Renja			Jumlah Dokumen Penyusunan P- Renja		1 dokumen		4.000.000					
2	0	0	2	0	0		Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 laporan		5.200.000					
							<u>Rincian :</u>												
							LKjIP			Jumlah laporan		1 laporan		500.000					
							RB			Jumlah laporan		1 laporan		3.00.000					
							SAKIP			Jumlah laporan		1 laporan		3.000.000					
							LKPJ			Jumlah laporan		1 laporan		300.000					
							Evaluasi triwulan			Jumlah laporan		4 laporan		300.000					
							LPPD			Jumlah laporan		1 laporan		300.000					
							CALK			Jumlah laporan		1 laporan		500.000					
2	0	0	2	0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		L	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		86%		5.591.681.000					
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 orang	Kab. Mojokerto	5.591.681.000					
							<u>Rincian :</u>												

							Gaji ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji		36 Orang/bulan		3.173.379.000					
							Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan		36 Orang/bulan		2.298.600.000					
							Honor Pengelola Keuangan		Jumlah pengelola keuangan yang mendapat honor		8 Orang/bulan		119.702.000					
2	0	0	2	0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	L	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan		90%		148.721.375					
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		14 Paket	Kab. Mojokerto	12.000.000					
							<u>Rincian :</u>	L										
							Beli AC, PC, Printer, laptop		Jumlah paket		14 Paket	Kab. Mojokerto	12.000.000					
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	L	Jumlah Mamin yang Di Sediakan		168 paket	Kab. Mojokerto	12.000.000					
							<u>Rincian :</u>	L										
							Makan minum rapat	L	Jumlah paket untuk mamin rapat		168 paket	Kab. Mojokerto	12.000.000					
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	Kab. Mojokerto	25.000.000					
							<u>Rincian :</u>											
							Cetak map, amplop, blanco dan lembar disposisi		Jumlah paket cetak untuk kelengkapan kantor		4 paket		25.000.000					

2	0	0	2	0	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	9.000.000					
							<u>Rincian :</u>									
							Beli koran		Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan	6 dokumen	9.000.000					
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	33.721.375					
							<u>Rincian :</u>									
							Beli ATK			4 paket	33.721.375					
2	0	0	2	0	0		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.000.000					
							<u>Rincian :</u>									
							Makan minum tamu		Jumlah laporan rapat perbulan	12 laporan	7.000.000					
2	0	0	2	0	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119 laporan	50.000.000					
							<u>Rincian :</u>									
							Biaya dinas luar dan dalam daerah		Jumlah laporan perjalanan dinas perbulan	119 laporan	50.000.000					
2	0	0	2	0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	90%	-					

2	0	0	2	0			Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6 Unit		-					
							<u>Rincian :</u>												
							Kursi pejabat			jumlah paket		6 Unit		-					
2	0	0	2	0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		90 %		139.622.400					
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 laporan	Kab. Mojokerto	75.000.000					
							<u>Rincian :</u>												
							Bayar listrik			jumlah laporan bayar listrik perbulan		12 laporan		65.100.000					
							Bayar telpon dan internet			jumlah laporan bayar telpon perbulan		12 laporan		9.900.000					
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan		12 laporan	Kab. Mojokerto	64.622.400					
							<u>Rincian :</u>												
							Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 5 orang			jumlah laporan untuk honor THL		12 laporan		64.622.400					
2	0	0	2	0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		L	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		90 %		150.000.000					

							Urusan Pemerintahan Daerah												
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		182 Unit	Kab. Mojokerto	105.000.000					
							<u>Rincian :</u>												
							service mobil dan motor			jumlah kendaran mobil yang di service		182 unit (6 mobil, 176 motor)		21.319.500					
							Pajak Kendaraan roda dua dan roda 4 dan service kendaraan			jumlah kendaran mobil dan motor yang dibayrkan pajaknya		182 unit (6 mobil, 176 motor)		38.900.000					
							BBM dan olie kendaraan roda 4			jumlah kendaran mobil yang dimendapat BBM		6 mobil		39.586.725					
							Ban mobil			jumlah kendaran mobil yang diganti ban		1 mobil		3.092.000					
							Accu mobil			jumlah kendaran mobil yang diganti accu		1 mobil		2.101.775					
2	0	0	2	0	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Gedung	Kab. Mojokerto	25.000.000					
							<u>Rincian :</u>												
							rehab dan cat gedung kantor			jumlah gedung yang di rehab		3 Gedung		25.000.000					
2	0	0	2	0	1		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		21 Unit	Kab. Mojokerto	20.000.000					

								Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
								<u>Rincian :</u>											
								service AC, printer, laptop, PC dll			jumlah unit peralatan kantor yang diperbaiki		21 Unit		20.000.000				
2	1	0						Program Pengendalian Penduduk		L	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan		100%		82.833.850				181.865.000
2	1	0	2	0				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		B	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK		100 Orang		9.464.000				
2	1	0	2	0	1			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		B	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		1 Laporan	Kab. Mojokerto	9.464.000				
								<u>Rincian :</u>											
								Rapat dengan lintas sektor / instansi terkait		B									

2	1 4	0 2	2	0 2			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		L			1.169.760 jiwa	Kab. Mojokert o	73.369.850				181.865.000	
2	1 4	0 2	2	0 2	0 8		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		B	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk		38 Unit	Kab. Mojokerto	24.754.000					
							<u>Rincian :</u>												
							Membuat papan data kependudukan pada kampung KB												
2	1 4	0 2	2	0 2	1 1		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		L	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		1 Dokumen	Kab. Mojokerto					35.465.000	
							<u>Rincian :</u>												
							Pelatihan PKB/PLKB dalam pencatatan dan pelaporan data												
2	1 4	0 2	2	0 2	1 3		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (APBD dan DAK Non Fisik)		L	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		2 Dokumen	Kab. Mojokerto	24.169.850				146.400.000	
							<u>Rincian :</u>												

							1. Rapat Evaluasi Laporan Bangga Kencana (bentuk buku laporan) (APBD) 2. Penunjang DAK Non Fisik (Penunjang DAK Non Fisik)											
2	1 4	0 2	2	0 2	1 4		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPk		L	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		1 Laporan	Kab. Mojokerto	24.446.000				
							<u>Rincian :</u>											
							Bimbingan teknis bagi PKB/PLKB dalam pencatatan dan pelaporan NEW SIGA											
2	1 4	0 3					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		L	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana		80,57%		1.420.764.200				5.287.299.000
2	1 4	0 3	2	0 1			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		L	Jumlah media komunikasi program KKBPk		144 Orang	Kab. Mojokerto	50.000.000				1.149.815.000
2	1 4	0 3	2	0 1	0 1		Advokasi Program KKBPk kepada		L	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program		12 Orang	Kab. Mojokerto					4.375.000

							Stakeholders dan Mitra Kerja			Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
							<u>Rincian :</u>												
							Rapat Peningkatan program Bangga Kencana dan Kespro kepada lintas sektor dan Koordinator PLKB												
2	1 4	0 3	2	0 1	0 2		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK Non Fisik)		L	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1 Dokumen	Kab. Mojokerto					25.000.000	
							<u>Rincian :</u>												
							Promosi program Bangga Kencana dengan Media KIE (cetak benner, roll benner, gerak mupen)		L										
2	1 4	0 3	2	0 1	0 4		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (APBD dan DAK Non Fisik)		L	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,		2 Dokumen	Kab. Mojokerto	25.000.000				70.640.000	

							Rapat pengendalian program KKBPK dan makan minum												
2	1 4	0 3	2	0 2			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)			Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK		60 Orang		1.041.524.200				1.459.200.000	
2	1 4	0 3	2	0 2	0 1		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		1 organisasi	Kab. Mojokerto	900.000.000					
							<u>Rincian :</u>												
							Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD												
2	1 4	0 3	2	0 2	0 2		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		3 unit	Kab. Mojokerto	99.764.200					
							<u>Rincian :</u>												
							Penunjang DAK Fisik						Kab. Mojokerto						
2	1 4	0 3	2	0 2	0 3		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa		1 Laporan	Kab. Mojokerto	41.760.000					

							Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)			Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
							<u>Rincian :</u>											
							Sarana prasarana (ATK 18 Balai Penyuluh KB)					Kab. Mojokerto						
2	1	0	2	0	0		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		1.828 orang					1.459.200.000	
							<u>Rincian :</u>											
							Honorarium pelaksana KIE untuk meningkatkan KB baru MKJP					Kab. Mojokerto						
2	1	0	2	0			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP		26.929 alokon	Kab. Mojokerto	304.240.000			2.022.784.000	

2	1 4	0 3	2	0 3	0 1		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jaringan (APBD dan DAK NON FISIK)			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya		2 Laporan	Kab. Mojokerto	25.000.000				18.900.000	
							<u>Rincian :</u>												
							Mencukupi kebutuhan ALKON di FASKES KB (distribusi alokon) (APBD)												
							Mencukupi kebutuhan ALKON di FASKES KB (distribusi alokon) (DAK)												
2	1 4	0 3	2	0 3	0 3		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (APBD dan DAK NON FISIK)			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		2.229 orang	Kab. Mojokerto	269.240.000				822.439.000	
							<u>Rincian :</u>												
							Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Peningkatan KB MKJP												
							Biaya penggerakan dan pelayanan KB (jasa medis, biaya transport penggerakan, biaya transport pengganti												

							tidak bekerja) (DAK NON FISIK)												
2	1	0	2	0	0		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		1Dokumen		-					
							<u>Rincian :</u>			-									
							Rapat penyusunan rencana kebutuhan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB			-									
2	1	0	2	0	0		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		6 unit	Kab. Mojokerto					1.165.845.000	
							<u>Rincian :</u>												
							Perlengkapan balai penyuluh KB, Rehab balai penyuluh KB (Sisa yang belum di rehab 6 balai penyuluh) dan Power Aktif												
2	1	0	2	0	0		Pembinaan Pelayanan Keluarga Beencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK)			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		1 laporan	Kab. Mojokerto	10.000.000				15.600.000	
							<u>Rincian :</u>												

							Rapat koordinasi bersama 43 Faskes												
2	1 4	0 3	2	0 3	1 0		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		36 orang	Kab. Mojokerto	-					
							<u>Rincian :</u>												
							Rapat kompetensi tenaga pelayanan KB												
2	1 4	0 3	2	0 4			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)		1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	Kab. Mojokerto	25.000.000				655.500.000	
2	1 4	0 3	2	0 4	0 2		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		1 dokumen	Kab. Mojokerto	-					
							Rincian :												
							Interaksi lintas sektor dalam pengembangan program Bangga Kencana (bersama kepala Desa Kampung KB)												

2	1 4	0 3	2	0 4	0 3		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK BOKB)		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		38 kampung KB	Kab. Mojokerto	25.000.000				655.500.000	
							<u>Rincian :</u>											
							Rapat pelaksanaan pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB (rapat ketahanan keluarga, rapat pokja kampung KB, Transport pertemuan, honor fasilitator, ATK, leaflet)											
2	1 4	0 4					Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif		97,86%	Kab. Mojokerto	84.526.000				5.182.520.000	
2	1 4	0 4	2	0 1			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan		1.066 kelompok	Kab. Mojokerto	64.684.00				5.182.520.000	
2	1 4	0 4	2	0 1	0 1		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina		3kelompok	Kab. Mojokerto	19.921.000					

							(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk									
							<u>Rincian :</u>												
							Lomba Duta Genre dan Pembinaan Duta Genre												
2	1 4	0 4	2	0 1	0 2		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(D AK FISIK)			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS		2 unit		150.000.000					
							<u>Rincian :</u>												
							Pembinaan dan lomba kelompok BKB (PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH)												
2	1 4	0 4	2	0 1	0 3		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan		1 Laporan		9.921.000					

							BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)			Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
							<u>Rincian :</u>												
							Pembinaan dan lomba kelompok BKB (PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH)												
2	1	0	2	0	0		Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)			Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		20 orang		9.921.000					
	4	4		1	4														
							<u>Rincian :</u>												
							Pembinaan Insan Genre dan Saka Kencana mengenai promosi program GENRE (Generasi Berencana)												
2	1	0	2	0	0		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan		2.586 Orang		5.032.520.000					
	4	4		1	5														

							Ekonomi Keluarga / UPPKS)(DAK NON FISIK)			Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
							<u>Rincian :</u>												
							Pulsa Paket Data, Transport TPK setiap kali kunjungan @ 10.00 x 2.586 Orang, (Transport pendampingan catin, Transport pendampingan ibu hamil, Transport pendampingan pasca persalinan) (DAK NON FISIK) (PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH)												
2	1 4	0 4	2	0 1	0 9		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Bangsa Kencana (Indeks Pembangunan Keluarga)		18 Dokumen		24.921.000					
							<u>Rincian :</u>												
							Pelaksanaan pembinaan dan lomba kelompok BKL												
2	1 4	0 4	2	0 2			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan		1.066 kelompok		19.842.000					

							dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
2	1 4	0 4	2	0 2	0 2		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1 laporan		9.921.000					
							<u>Rincian :</u>												
2	1 4	0 4	2	0 2	0 4		Pembinaan kelompok BKR mengenai kesehatan reproduksi remaja (keluarga remaja)												
							Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		1 Laporan		9.921.000					
							<u>Rincian :</u>												
							Pembinaan kelompok PIK R mengenai kesehatan												

							reproduksi remaja (pada remaja												
2	0	0					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	82,14%		69.813.125						
2	0	0	2	0			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD		35.000.000						
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Dokumen		10.000.000						
							<u>Rincian :</u>												
2	0	0	2	0	0		Pelatihan PPRG untuk bidang - bidang di DP2KBP2 (TEMATIK PUG)												
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 perangkat daerah		25.000.000						

							<u>Rincian :</u>												
							Pelatihan PPRG untuk bidang - bidang di seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto (TEMATIK PUG)												
2	0	0	2	0			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan		90 orang		34.813.125					
2	0	0	2	0	0		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		18 Lembaga		24.813.125					
							<u>Rincian :</u>												
							Bintek Peningkatan kapasitas organisasi perempuan dan perempuan pengambil kebijakan (TEMATIK PUG)												
2	0	0	2	0	0		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 dokumen		10.000.000					

								<u>Rincian :</u>											
								Sosialisasi Perda PUG (TEMATIK PUG)											
2	0	0						Program Perlindungan Perempuan			Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan		100,00%		134.243.450				
2	0	0	2	0				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO		65 orang		50.000.000				
2	0	0	2	0	0			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen		50.000.000				
								<u>Rincian :</u>											
								Honor P2TP2A (honor penjaga selter, psikolog, pengacara, admin website) Honor PPTK (TEMATIK PUG)											
2	0	0	2	0				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan			Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A		15 mitra kerja / jejaring		74.243.450				

							yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota												
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		54 orang		49.673.750					
							<u>Rincian :</u>												
							Rakor P2TP2A (fasilitasi pengembangan P2TP2A) (TEMATIK PUG)												
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		3 layanan		24.569.700					
							<u>Rincian :</u>												
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												

2	0	0	2	0			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan		43 orang		10.000.000					
2	0	0	2	0	0		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		36 orang		10.000.000					
							<u>Rincian :</u>												
							Bimbingan teknis pendidikan karanker keluarga (peserta pengurus gugus tugas PPA Desa) (TEMATIK PUG)												
2	0	0					Program Peningkatan Kualitas Keluarga			Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa		49,34%		10.000.000					
2	0	0	2	0			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak			Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa				10.000.000					

							Tingkat Daerah Kabupaten / Kota												
2	0	0	2	0	0		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		57 perangkat daerah		10.000.000					
							Rincian : Pelatihan PPRG untuk sekretaris desa di Kabupaten Mojokerto (TEMATIK PUG)												
2	0	0					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak		93,75%		25.000.000					
2	0	0	2	0			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun		1 buku		25.000.000					
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 dokumen		25.000.000					
							Rincian : Penyusunan profil data gender dan anak (TEMATIK KLA dan PUG)												

2	0	0					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Prosentase kecamatan layak anak		38,89%		79.537.000					
										Prosentase desa kelurahan layak anak		10,56%							
2	0	0	2	0			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA		40 orang		59.760.000					
2	0	0	2	0	0		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		27 organisasi		9.880.000					
							Rincian : Fasilitasi Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto (TEMATIK KLA)												
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen		49.880.000					
							Rincian : Pelaksanaan lomba KLA tingkat Nasional (TEMATIK												

							KLA untuk fasilitasi monitoring dan evaluasi KLA)												
2	0	0	2	0			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto		125 orang		19.777.000					
2	0	0	2	0	0		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		95 orang		9.868.000					
							Rincian : Pelatihan KHA (TEMATIK KLA)												
2	0	0	2	0	0		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen		9.909.000					
							Rincian : Koordinasi dengan jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan Hak Anak di tingkat Kabupaten (TEMATIK KLA)												
2	0	0					Program Perlindungan Khusus Anak			Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan		41,82%		139.561.000					

										dengan hukum) yang mendapatkan layanan									
2	0 8	0 7	2	0 1				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO		30 orang		9.861.000				
2	0 8	0 7	2	0 1	0 1			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		15 perangkat daerah		9.861.000				
								Rincian : Koordinasi lintas sektor dengan pembentukan FDG (TEMATIK KLA)											
2	0 8	0 7	2	0 2				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan		125 orang		119.965.000				
2	0 8	0 7	2	0 2	0 1			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang Memerlukan Perlindungan			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan		5 orang		9.965.000				

							Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota									
							<u>Rincian :</u> Untuk pelayanan terhadap korban kekerasan (TEMATIK KLA)												
2	0	0	2	0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		10 layanan		50.000.000					
							<u>Rincian :</u> Honor Narasumber dan sosialisasi kegiatan pencegahan kekerasan												
2	0	0	2	0	0		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen		60.000.000					
							<u>Rincian :</u> Honor P2TP2A (Lembaga bantuan hukum, psikolog, pengacara, penerima dan pencatat pengaduan kasus), Honor PPTK, Honor												

							Tim Keanggotaan P2TP2A, Beli ATK Kegiatan (TEMATIK KLA)												
2	0 8	0 7	2	0 3			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak		108 orang		9.735.000					
2	0 8	0 7	2	0 3	0 1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		18 laporan		9.735.000					
														8.089.003.400				10.651.684.000	

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan penjabaran / pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan kedalam rencana kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2021 – 2026 dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat memberikan manfaat bagi public atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandate kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini

dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Mojokerto, Juni 2022

Kepala Dinas PPKBPP Kab. Mojokerto



dr. SUJATMIKO, M.M., M.M.R
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 199603 1 002